



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Derajat Strata Satu
(S-1)**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

SUCI ROIMAWATI

4314500190

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya SUCI ROIMAWATI, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Mei 2019

Yang menyatakan



SUCI ROIMAWATI

LEMBAR PENGESAHAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)

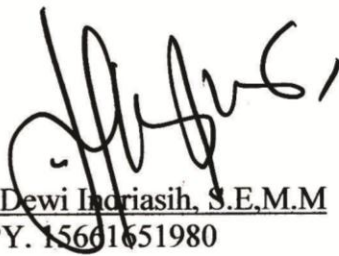
SKRIPSI

Oleh:

Suci Roimawati
NPM: 4314500190

Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I




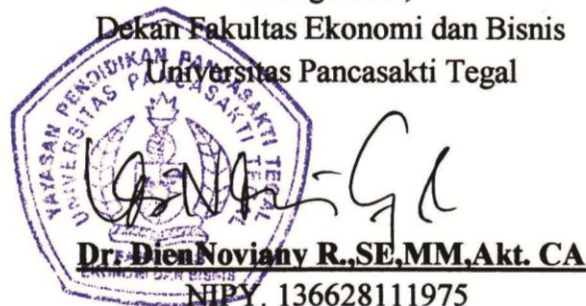
Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M
NIPY. 15661651980
Tanggal:

Pembimbing II



Teguh Budi Raharjo, SE, M.M
NIPY. 19461551976
Tanggal:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Novian R., SE, MM, Akt. CA
NIPY. 136628111975

PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Wajib pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan pajak Pratama Kota Tegal)

Yang diajukan oleh Suci Roimawati, NIM 4314500190 telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 21 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I


Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M

NIPY. 15661651980

Penguji II

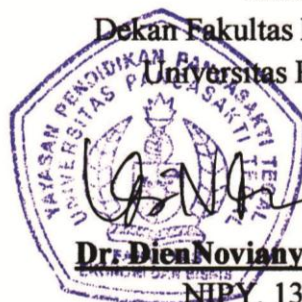

Aminul Fajri, S.E., M.Si

NIPY. 1385231970

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Noviany R., SE, MM, Akt. CA

NIPY. 136628111975

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kemudahan serta rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)”**. Proposal penelitian untuk skripsi dapat disusun dengan baik dan dapat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ibu Dr. Dien Noviany R, S.E, M.M, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Aminul Fajri, S.E, M.Si, Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi
4. Ibu Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M. selaku Pembimbing I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Teguh Budi R, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

6. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Proposal Penelitian untuk Skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dalam bentuk apapun sangat diperlukan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga Proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang tidak pernah berhenti dan puas dalam belajar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tegal, Mei 2019

Suci Roimawati

MOTTO

- Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu.-Norman Vincent Peale-
- Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda. - Albert Einstein -
- Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka. - Lao Tzu -
- Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya. - Maya Angelou -
- Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. - Bobby Unser -
- Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak tahu. - Aristotle Onassis -

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Saya Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Bapak Ibuku yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh dengan kasih sayang, serta memberi dukungan dan motivasi dalam hidup ini.
Terimakasih Bapak Ibu.
2. Buat adiku Lili Wediyawati yang selalu membantu mengetik.
3. Buat semua keluarga besar yang tak pernah lelah mendukungku.
4. Buat teman-temanku Dwiastuti, Devi, Ta. Yang selalu memberikan dorongan dalam pembuatan skripsi.
5. Buat sahabat seperjuangan Devi Yo, Suryati.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Faktor-Faktor tersebut yaitu persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Populasi dari penelitian ini sebanyak 237.583 responden sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci : persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, Kepatuhan Membayar Pajak.

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that influence the compliance of paying the personal taxpayers tax registered in KPP Pratama Tegal. These factors are good perception of the effectiveness of taxation sadduccean, knowledge and understanding of taxation regulations, awareness of paying taxes, the level of confidence in the system of law and government. The data used in this research is primary data using questionnaires. The population in this study was 237,583 respondents whereas samples were taken in the study of 100 respondents. The data analysis methods used are multiple linear analyses.

The results of this study showed that a good perception variable on the effectiveness of taxation systems, knowledge and understanding of taxation regulations, awareness of paying taxes, level of confidence in law and government has no effect To pay tax compliance. While

Keywords: good perception of the effectiveness of taxation systems, knowledge and understanding of taxation regulations, awareness of paying taxes, the level of confidence in law and Government, compliance to pay taxes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Bakti	11
2. Pajak	12
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	17
4. Tarif Pajak	20
5. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan	20
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berfikir	36
D. Perumusan Hipotesis	39

BAB III	METODE PENELITIAN	41
	A. Pemilihan Metode	41
	B. Lokasi Penelitian	41
	C. Teknik Pengambilan Sampel	41
	1. Populasi	41
	2. Sampel	42
	D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	43
	1. Definisi Konseptual	43
	a) Variabel Dependen (y)	43
	b) Variabel Independen (X)	44
	2. Definisi Operasional Variabel	46
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Teknik Pengolahan Data	49
	G. Analisis Data dan Uji Hipotesis	49
	1. Uji Asumsi Klasik	49
	a) Uji Normalitas	49
	b) Uji Multikolinieritas	50
	c) Uji Heteroskedastisitas	50
	2. Analisis Regresi Linier Berganda	50
	3. Pengujian Hipotesis	52
	a. Uji parsial (Uji statistik t)	52
	b. Uji Simultan (Uji Statistik F)	53
	c. Koefisien Determinan (R^2)	53
BAB IV	HASIL DAN UJI PEMBAHASAN.....	54
	A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	54
	1. Sejarah Kantor KPP Pratama Tegal	54
	2. Kedudukan dan Fungsi KPP	56
	3. Struktur dan Deskriptif Tugas KPP	57
	B. Hasil Penelitian	60
	1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	61

2.	Gambaran Umum Sampel dan Profil Responden	62
3.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	63
4.	Hasil Uji Validitas	65
5.	Hasil Uji Asumsi Klasik	68
a.	Hasil Uji Normalitas	68
b.	Hasil Uji Multikolinieritas	69
c.	Hasil Uji Heterokedastisitas	71
6.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	72
7.	Hasil Uji Hipotesis	75
a.	Uji Parsial (Uji Statistik t)	75
b.	Uji Simultan (Uji Statistik f)	76
c.	Koefisien Determinasi	78
C.	Pembahasan	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

2.2 Penelitian Terdahulu	31
3.1 Konseptual Variabel	46
4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	61
4.2 Profil Responden	62
4.3 Statistik Deskriptif	63
4.4 Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak	66
4.5 Validitas Persepsi yang Baik atas Efektifitas Perpajakan	66
4.6 Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	67
4.7 Validitas Kesadaran Membayar Pajak	67
4.8 Validitas Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan	68
4.9 Uji Normalitas	69
4.10 Uji Multikolinieritas	70
4.11 Analisis Regresi Linier Berganda	73
4.12 Uji Statistik t	75
4.13 Uji Statistik f	77
4.14 Koefisien Determinasi	78

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	39
4.1 Bagan Struktur KPP	60
4.2 Uji Heterokedastisitas	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi supaya menjadi negara yang lebih maju, indonesia belum dapat memanfaatkan potensi tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa indonesia mengalami masalah hampir dalam semua sektor yang ada, salah satunya ialah dalam sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak dapat diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Dikrenakan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang dapat diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan Negara (Listyaningtyas, 2011).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut kangtoshi (2010), pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Fikriningrum, dan Syafruddin,2012).

Masinambaw (2013) menjelaskan bahwa, pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak di antara adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Menurut (Fahluzy, Septian, Agustina, & Linda, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal, 2014), persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan

melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum ada pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*, semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses perpajakan dengan mudah dan cepat sehingga persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Agenda aksi Direktorat Jendral Pajak berupa usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi pajak*, dimana usaha *ekstensifikasi* dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan *intensifikasi* ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan dilapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Usaha *intensifikasi* lebih murah dan efisien dari pada usaha *ekstensifikasi*. Masih banyak wajib pajak yang mungkin belum terdaftar sebagai wajib pajak sesungguhnya. Ketidak taatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi terjadi juga pada pekerja profesional, sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman baik wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang terutama

bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Yulianawati,2011).

Fenomena yang terjadi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tahun 2017 sejumlah 12,05 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan target, di duga karena tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan dan kesadaran membayar pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal perlu ditingkatkan lagi demi kelangsungan pembangunan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merasa kurang cukup puas dengan perubahan sistem pemungutan pajak. Sehingga demi tercapainya pendapatan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pemerintah mengembangkan sistem online dan fasilitas internet sebagai inovasi guna memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan modernisasi dengan sistem administrasi perpajakan Widya (2015).

Pengembangan ilmu dan teknologi semakin maju, khususnya kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi akan lebih

efektif dan efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi. Terlihat dari kemajuan alat teknologi di beberapa Negara di Dunia. Perkembangan akan membuat persaingan di segala bidang akan semakin ketat. Kecanggihan alat-alat teknologi yang diimbangi dengan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai, maka tingkat produktivitas kerja tentu akan semakin meningkat pula. Pada perekonomian global teknologi media online sudah banyak digunakan oleh masyarakat bahkan juga sudah digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan teknologi informasi dapat mendukung sistem pemerintahan yang lebih baik (Inggrid dan Herry, 2013).

Kemajuan perkembangan teknologi menjadi sumber perubahan besar sehingga semua aspek termasuk pembangunan nasional terkena dampak dari teknologi tersebut. Perekonomian di Indonesia dan pembangunan memiliki ketergantungan terhadap teknologi komputer dan internet. Pemanfaatan teknologi marak dimanfaatkan dari semua kalangan, karena dapat memberikan kemudahan dalam membentuk aktivitas, salah satunya dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Tingkat pemanfaatan teknologi beriringan dengan tingkat pengetahuan perpajakan, secara tidak langsung semakin meningkatnya pelayanan teknologi bagi wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan mengerti tentang pengetahuan perpajakan Viega (2017).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pasti berbeda-beda dari setiap individu. Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), salah satu faktor utama kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak akan merasa acuh terhadap peraturan yang di buat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan keadilan perpajakan dimana wajib pajak akan patuh jika merasa sistem pemungutan pajak yang diberlakukan sesuai dengan asas keadilan. Menurut Caroko, dkk (2015), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak, informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak adalah sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan.

Mengenai aspek pentingnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan tentang pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan dalam melaporkan pajaknya, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa wajib pajak mempunyai kemauan untuk melaksanakan perpajakannya. Penelitian selanjutnya mengenai kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

Penelitian Muliari dan Ery Setiawan (2010) juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum. Dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk menutup biaya produksi dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum bagi masyarakat. Akan tetapi faktanya banyak ketidakpahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti ini mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak ?

2. Apakah ada pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak ?
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak ?
4. Apakah ada pengaruh kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak ?
5. Apakah ada pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dalam kepatuhan membayar pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh pada persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif secara teoritis, praktis maupun akademis:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat guna mengembangkan ilmu yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai wujud nyata dari pengembangan ilmu yang di dapatkan saat perkuliahan.

b. Bagi Kantor pelayanan pajak

Bagi kantor pelayanan pajak pratama kota Tegal, sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penertiban membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Universitas Pancasakti

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya pada perpajakan.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Bakti

Teori Bakti menekankan pada paham organisasi Negara bahwa sebagian organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan, termasuk dalam bidang pajak. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat membayar pajak sebagai tanda buktinya. Teori bakti menekankan bahwa Negara mempunyai hak mutlak memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap Negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.

Teori ini mengemukakan bahwa individu tanpa Negara tidak mungkin hidup bebas berusaha di Negara. Oleh karena itu Negara mempunyai hak untuk memungutpajak, orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Teori ini menitikberatkan kepada Negara, yaitu individu seolah-olah tidak dapat hidup tanpa Negara, tetapi Negara dapat hidup tanpa individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi Negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda buktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak (Resmi, 2014).

2. Pajak

a) Pajak Menurut Beberapa Ahli

Pajak dikemukakan oleh prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut disempurnakan sehingga berbunyi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan Devano Rahayu (2006).

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2001 :1) Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Rochmat Soemitro, pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Suandy, 2008 : 8)

Pajak menurut Andriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak menurut Smeets adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Jadi, pajak merupakan iuran yang dapat dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak guna menutupi pengeluaran rutin negara dan pembangunan tanpa balas jasa secara langsung, pajak merupakan peranan aktif dalam meningkatkan penerimaan negara yang sifatnya dipaksakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki cirri-ciri dan unsure-unsur pajak menurut (Siti Resmi : 2003) sebagai berikut :

1) Ciri-Ciri Pajak :

- (a) Pajak di pungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (b) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (c) Pajak dipungut negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- (d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publick invesment*.
- (e) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

2) Unsur Pajak

- a) iuran/pungutan dari Rakyat kepada Negara.
- b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- c) Pajak dapat dipaksakan, dengan kata lain dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang.
- d) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi.
- e) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah).

b) Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo 2016:4), yaitu :

- (a) Fungsi anggaran (*budgetair*) pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (b) Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c) Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis macam pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut Golongannya, menurut Sifatnya, dan menurut Lembaga Pemungutan. Menurut Mardiasmo (2016:7)

1. Menurut Golongannya

Menurut Golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- (a) Pajak *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak Penghasilan.

(b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

(a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

(b) Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan objeknya yaitu berupa benda atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutanya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. *Pajak daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak hotel, pajak reklame, dan pajak hiburan.

3. Tata cara dan pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 6) Tata cara pemungutan pajak di bagi menjadi tiga kelompok yaitu stesel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1) Stesel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel, yaitu stesel nyata, stesel anggapan dan stesel campuran.

a. Stesel nyata (riil)

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir taun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stesel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga :

a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.

b. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh undang-undang misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2) Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menegenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumbera

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem pemungutan pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem suatu pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmono (2011:9) Ada empat macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proposional berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga

besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh pajak pertambahan nilai 10%.

2. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh bea materai untuk cek.
3. Tarif progresif presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumla yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan.
4. Tarif Degresi presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
5. Ketentuan dan tata cara perpajakan

- a. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan pajak dan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo: 2011)

- 1) Fungsi NPWP

- a) Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

- 2) Pendaftaran NPWP

Semua wajib pajak yang tela memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk di catat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3) Syarat Memiliki NPWP

- a) Mengisi formulir pendaftaran yang di dapat dari kantor pelayanan pajak.
- b) Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, atau paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang bermaterai dari yang bersangkutan bagi orang asing (formulir tersedia di Kantor Pelayanan Pajak).

b. Surat Pemberitahuan

1) Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan harta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo 2011: 31).

2) Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) maka wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan memberikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 Tahun sebelum kadaluarsa penetapan masa pajak bagi tahun pajak sebagai berikut :

- a. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan maupun surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- b. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, terhadap ketidakbenaran pembetulan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri menggunakan ketidak benaran perbuatannya

tersebut dengan disertai pelunasan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya atau dapat mengakibatkan :

- a. Pajak-pajak masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

4) Batas waktu penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut (Siti Resmi : 2003) sebagai berikut :

- a. Untuk SPT masa, harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- b. Untuk SPT tahunan, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

1) Batas waktu penyampaian SPT masa, pihak yang menyampaikan SPT, dan batas waktu penyampaian setiap jenis pajak diatur secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Batas penyampaian SPT masa

No	Jenis Pajak	yang menyampaikan	batas waktu penyampaian
1	PPh Pasal 21	Pemotongan PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan Takwim berikutnya

			setelah masa pajak berakhir
2	PPh Pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atas Impor	Wajib Pajak	14 hari setelah masa berakhirnya pajak
3	PPh Pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atas Impor	Direktorat Jendral Pajak	7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
4	PPh Pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan	20 hari setelah masa pajak berikutnya
5	PPh Pasal 22 Bahan Bakar	Pertamina	20 hari setelah masa pajak
6	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh badan tertentu	Pemungut pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
7	PPh Pasal 23	Pemotong PPh Pasal 23	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
8	PPh Pasal 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
9	PPh Pasal 26	Pemotong PPh Pasal 26	tanggal 20 bulan takwim

			berikutnya setelah masa pajak berakhir
10	PPN dan PPn Bm	Pengusaha kena pajak	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
11	PPN dan PPn BM Bendaharawan	bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah masa pajak berakhir
12	PPN dan PPn BM selain Bendaharawan	Selain Bendaharawan Pemerintah	20 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber: diolah dari berbagai sumber

4. Wajib pajak

a. Pengertian wajib pajak

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian menurut beberapa sumber :

Menurut Pasal 1 UU No.28 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan wajib pajak menurut beberapa ahli :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2008:18).

b. Kemauan membayar pajak

Kemauan adalah dorongan dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar pajak merupakan suatu dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau merelakan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widaningrum 2007 dalam Fikriningrum 2012).

Konsep kemauan membayar pajak menurut Tatiana dan Priyo dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk mebayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak menurut (Feldman, 2010) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

c. Kesadaran membayar

Kesadaran merupakan keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran bagi wajib pajak merupakan hal penting dalam kewajiban perpajakan (Hardiningsih, 2011). Indikator kesadaran membayar pajak antara lain :

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
5. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

d. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak

Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundangan (syarat-syarat) mengenai pembayaran pajak (Tedi Permadi, dkk. 2013). Syarat-syarat guna melakukan pembayara pajak yaitu wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT (Tatiana dan Priyo, 2009). Variabel ini diukur menggunakan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian

Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari empat item pertanyaan.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP Dan tarif pajak.
 3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak mengetahui sosialisasi.
 4. Pengetahuan dan pemahan peraturan pajak melalui training.
- e. Tingkat kepercayaan terhadap sistem Pemerintahan dan Hukum

Menurut (Tedi Permadi, dkk, 2013) kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Variabel ini dikur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Handayani (2012).

Indikator yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
2. Kepercayaan terhadap sistem hukum.
3. Kepercayaan terhadap politisi.
4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali kerakyat.

f. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Variabel penelitian ini adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Menurut Ramadiansyah (2014) persepsi adalah proses dimana individu mengatur menginterpretasi kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pembayaran melalui e-banking lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Adanya sistem pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan pajak melalui e-Filling.
3. Penyampaian SPT melalui drop box.
4. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Masruroh dan Zulaikha (2013)	Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Manfaat TIN, kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yaitu kemanfaatan NPWP.
2.	Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (<i>The Factor That Influence Willingness To Pay The Tax</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak.

			membayar pajak, dan unruk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.		
3.	Yuli Chomsatun Samrotun, Eny Kustiyah (2015)	Kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi ya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik tentang efektivitas sistem pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesediaan untuk membayar pajak, sementara pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan layanan fiskus tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keinginan membayar pajak.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan kesadaranmembayar pajak sebagai variabel independen.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak.
4.	Istiqomah Nur Azizah, dkk (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak

			<p>sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.</p>	<p>independen yaitu kesadaran membayar pajak.</p>	<p>pada variabel independen yaitu tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.</p>
5.	Nanang Agus Suyono (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di kantor elayanan pajak Wonosobo.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang	Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel	Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah terletak pada variabel independen

			peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan hukum, niat wajib pajak untuk patuh, serta kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.	kesadaran membayar pajak.	yang ada di penelitian terdahulu yang tidak digunakan pada penelitian sekarang yaitu persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.
6.	Titik dan Lidwina (2016)	Pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Persamaan analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.	Perbedaan pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode konvinience sampling, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode acidental sampling.
7.	Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib	Persamaan analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda dan menggunakan variabel pengetahuan pajak sebagai salah satu variabel bebas.	Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan metode <i>proportional sampling</i> , sedangkan pada penelitian menggunakan metode <i>acidental sampling</i> .

			pajak.		
8.	Aditya dkk (2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam membayarkan penghasilan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh kepada kepatuhan perpajakan, namun pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan membayar pajak orang pribadi.	Persamaan menggunakan kesadaran membayar pajak sebagai variabel	Pada penelitian sebelumnya menggunakan alat statistik SPSS versi 16, sedangkan pada penelitian ini menggunakan alat statistik SPSS versi 22.

Sumber : Data diolah sendiri

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti (Muhidin, 2011:6). Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di kota Tegal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Variabel independen penelitian ini adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Sistem perpajakan dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut dalam penerapannya tidak mempersulit wajib pajak itu sendiri Fahluzy dan Agustina (2014).

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Apabila untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku Hardiningsih (2011).

3. Kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

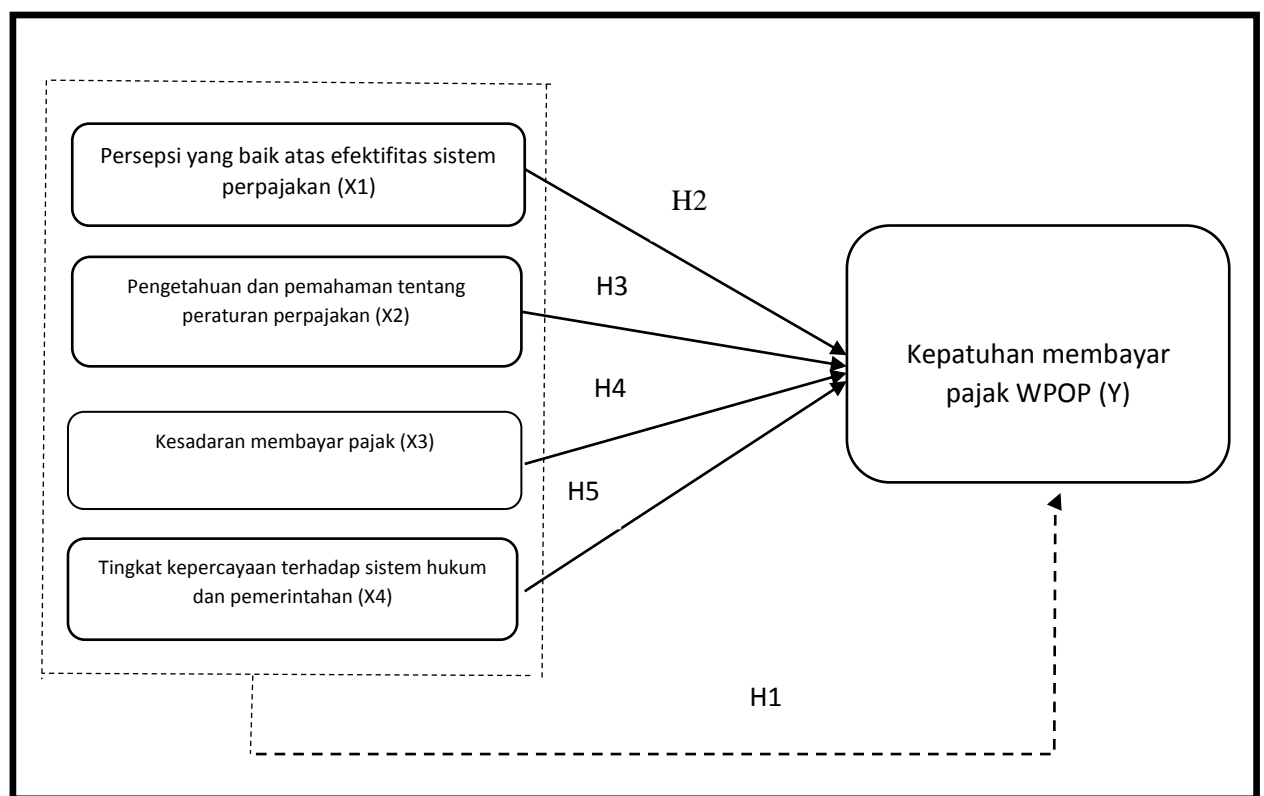
Kesadaran membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah dapat membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini dapat dilihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004).

4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapat tunjangan dari negara, misalnya tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis. Keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk

membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalanya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk menyingkahi kewajiban membayar pajak akan terkikis. Handayani (2012).

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil-hasil penelitian, maka model kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————→ = berpengaruh secara parsial

- - - - -→ = berpengaruh secara simultan

D. Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:96) hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan kepada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual diatas, maka penulis membuat hipotesis atas permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

- H1 : Diduga perpsepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP.
- H2 : Diduga persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP di Kota Tegal.
- H3 : Diduga pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP di Kota Tegal.
- H4 : Diduga kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP di Kota Tegal.

H5 : Diduga tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP di Kota Tegal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Penelitian ini menggunakan studi empiris kuantitatif, yang berupa data primer menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian menggunakan metode pembagian responden ini bertujuan untuk menghimpun data-data yang terdapat di lapangan yang bersifat individu, kemudian di gambarkan berdasarkan hasil uji statistik dan memperoleh manfaat dari masing-masing data yang dikumpulkan. Dan data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan program SPSS.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) kota Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Tegal, Provinsi Jawa Tengah, 52212.

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti Martono (2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang

Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Tegal, yaitu sebanyak 282.598 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan unit observasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi. Jadi sampel merupakan sebagian kecil dari sebuah populasi (Trenggonowati: 2009,62). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Amirin, 2009). Alasan pengambilan data menggunakan teknik ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel menjadi lebih cepat, adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam menentukan jumlah sampel menggunakan Rumus *Slovin*. Penyebaran kuesioner dimaksud untuk mendapatkan data umum mengenai WPOP yang membayar pajak di KPP Pratama kota Tegal. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak WPOP di Kota Tegal.

Berikut adalah perhitungan Rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Di mana :

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e= Tingkat Kesalahan

Populasi (N) sebanyak 282.598 seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, taraf kesalahan (e) sebesar 10%, maka jumlah sampel (n) adalah :

$$(n) = \frac{237.583}{1 + 237.583 \cdot 0,1^2}$$

= 99.96 dibulatkan menjadi 100 orang

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyetorkan pajak penghasilan di KPP Pratama Tegal.

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a) Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan sebuah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah motivasi wajib pajak baik perseorangan, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan perpajakan yang ditetapkan.

b) Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan(X1), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan(X2), kesadaran membayar pajak(X3), dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan(X4).

- 1) Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Sistem perpajakan dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut dalam penerapannya tidak mempersulit wajib pajak itu sendiri. Menurut Agustina (2014), penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Wajib untuk mendaftarkan diri bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan sebagai salah satu sarana untuk mengadministrasikan pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai

wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP dan PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima*, Adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang *keenam*, Bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

- 3) Kesadaran membayar pajak, kesadaran merupakan unsure dalam diri manusia dqalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut (Masinambow, 2013).
- 4) Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan

negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, dkk. 2013). Berbagai pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Apabila masyarakat sudah tidak percaya terhadap sistem hukum dan pemerintahan maka kesadaran dalam memberi pajak juga akan rendah.

2. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Permadi dkk (2015).	Pandangan Wajib Pajak tentang interpretasi dan pengukuran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran <i>e banking</i> - Pelaporan melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> - Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> - Pendaftaran NPWP melalui <i>e-registration</i> 	Skala Interval
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan Widayati dan Nurlis (2010)	Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dan penalaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar akan dikenai sanksi - Pajak yang dibayar dikenai tarif yang berlaku - Fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai 	Skala Interval

		<p>pengeluaran negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan 	
<p>Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan Widiyati dan Nurlis (2010)</p>	<p>Kepercayaan terhadap sistem penilaian dan kepentingan dana pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan terhadap sistem Pemerintahan - Kepercayaan terhadap sistem Hukum - Kepercayaan terhadap sisi Politik - Kepercayaan terhadap prmnungutan Pajak yang Dialokasikan kembali ke Rakyat 	Skala Interval
<p>Kesadaran Membayar Pajak Widayati dan Nurlis(2010)</p>	<p>Mengetahui dan meyakini dalam penalaran ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak yang saya bayar digunakan untuk pembangunan negara - iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang - kontribusi pengeluaran umum dan tugas pemerintah 	Skala Interval
<p>Kepatuhan membayar pajak Mardoiasmo dan kurnia Rahayu (2016)</p>	<p>Kontribusi terhadap peraturan dan pengeluaran perpajakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membayar dan menyetorkan pajak dengan perhitungan yang sesuai dengan perhitungan pajak yang terutang - Membayar pajak sesuai peraturan 	Skala Interval

		yang berlaku - Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan - Dokumentasi dalam laporan keuangan	
--	--	---	--

Sumber: data diolah sendiri

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

- a. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa berpengaruh oleh sistem yang di ajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
- b. Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
- c. Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur, jurnal, artikel, dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik Statistical Package Science (SPSS) versi 22.

G. Analisa Data dan Uji Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk menilai model regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

a) Uji Normalitas

Menurut Zulaikha (2012) Pengujian Normalitas adalah untuk apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang kita miliki berdistribusi normal atau mendekati normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (Santoso, 2015: 183).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual tetap, maka hal tersebut disebut Heterokedastisitas, tetapi jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas (Santoso, 2015:187).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknis analisis data regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan sebuah model persamaan (Santoso, 2015).

Model yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X1), Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), kesadaran membayar pajak (X3) dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (X4) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan membayar pajak WPOP (Y) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan membayar Pajak WPOP (variabel dependen)

X1 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem Perpajakan (variabel independen)

X2 : Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan Perpajakan (variabel independen)

X3 : Kesadaran membayar pajak (variable independen)

X4 : Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (variabel independen)

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2 \& \beta_3$: Koefisien regresi

e : error

3. Penguji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t -hitung dengan ketentuan:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal

ini menunjukkan bahwa variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

b) Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikan individu terhadap koefisien regresi diasumsikan bahwa setiap uji signifikan berdasarkan sampel (independen) yang berbeda. Uji F adalah pengujian efesien regresi secara uji serentak, yaitu uji statistik bagi koefisien regresi yang serentak mempengaruhi Y Ghozali (2016 : 96). Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

c) Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) Koefisien Determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah kantor pelayanan pajak pratama kota tegal

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata cara kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menerapkan struktur organisasi baru guna mendukung dan menerapkan dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi sistem administrasi perpajakan.

Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inpeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inpeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu belum terbentuk. (Menteri Keuangan)

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus digalakkan seiringan dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga sekarag ini, tidak sajak terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasilan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi sekitar daerah gunung slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas

mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok Nasional untuk komoditi tersebut. (Direktorat Jenderal Pajak)

Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak mempertimbangan kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Onpeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai kantor Inpeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi Sukarya. Untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung.

Nama Kantor Inpeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inpeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inpeksi atau pemeriksaan tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak.

Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan system administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai KDL Tingkat I Kantor Inpeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini berlokasi di jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal.

2. Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 Km yang terdiri dari tiga daerah meliputi :

1. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal
2. Kabuoaten Daerah Tingkat II Tegal
3. Kabupaten Daerah TingkatII Brebes

Dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara
2. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan
3. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai wilayah Timur

4. Kecamatan Losari, Kkabupaten Brebes, sebagai batas wilayah barat.

3. Struktur dan Deskriptif Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan struktur organisasi yang mencakup keseluruhan tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor :132/PMK.01/2006. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka struktur organisasi Kntor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, sebagaimana halnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Adapun rincian tugas pokok yang harus dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2001 tanggal 24 Mei 2004, pada pasal 38 sebagai berikut :

- a. Kepala Pelayanan Pajak mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi Kantor Wilayah.
- b. Sub bagian umum mempunyai tugas urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
- c. Sesi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, layanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kerja.

- d. Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penertiban hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
- e. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif usulan, penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

- g. Seksi Ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, penataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
- i. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jelasnya Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal bisa dilihat seperti pada gambar berikut :



Bagan Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

B. Hasil Penelitian

Mengenai hasil pengumpulan pada bab ini dijelaskan dalam pengolahan dan analisis data serta penjelasan pembahasan untuk melakukan konfirmasi rumusan hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Hasil penelitian pengaruh Persepsi yamh baik atas efektifitas sistem perpajakan (X1), Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan (X2), Kesadaran membayar pajak (X3), Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (X4), terhadap Kepatuhan membayar pajak (Y) yang akan diuraikan melalui tahapan antara lain : 1) Tingkat pengembalian kuesioner, 2) Gambaran umum sampel dan profil responden, 3) Analisis verifikatif.

1. Tingkat pengembalian kuesioner

Penyebaran dan pengumpulan dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang menjadi target responden. Sesuai dengan teknik sampel yang digunakan, peneliti mendatangi siapapun yang kebetulan bertemu dan dianggap sebagai responden untuk mengisi angket kuesioner. Pengisian kuesioner oleh responden ditunggu oleh peneliti sehingga pengembalian kuesioner langsung dapat diterima oleh peneliti.

Tabel 4.1

Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Tanggal Pembagian Kuesioner	Kuesioner Dibagi	Kuesioner Kembali
1.	13 Juni 2019	15	15
2.	14 Juni 2019	15	15
3.	17 Juni 2019	10	10
4.	18 Juni 2019	9	9
5.	19 Juni 2019	11	11
6.	20 Juni 2019	14	14
7.	21 Juni 2019	26	26
Jumlah			100

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019.

2. Gambaran Umum Sampel dan Profil Responden

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Adapun kuesioner yang diberikan berkenaan dengan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta kepatuhan wajib pajak. Kuesioner selanjutnya diisi oleh wajib pajak orang pribadi dengan cara memberikan tanda centang pada jawaban sesuai penilaian pribadi masing-masing pajak.

Tabel 4.2
Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin :		
1. Laki-Laki	68	68%
2. Perempuan	32	32%
Umur :		
>20 tahun	30	30%
21-30 tahun	32	32%
31-40 tahun	28	28%
<50 tahun	11	11%

Sumber : Data diolah sendiri, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai gambaran umum profil responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 68 orang dengan tingkat prosentase 68% dan responden perempuan sebanyak 32 orang dengan tingkat prosentase 32%. Hal ini dikarenakan sebagian besar menjadi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan penghasilannya adalah laki-laki. Proporsi responden

terbesar berkisar sekitar pada usia 21-30 tahun yaitu sebanyak 32 orang dengan prosentase 32%.

3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menunjukkan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, standar deviasi, dll (Ghozaly 2016 : 19). Gambaran analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan membayar pajak	24,34	3,296	99
persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan	24,41	3,902	99
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	23,54	3,360	99
kesadaran membayar pajak	20,60	3,027	99
tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	15,12	3,262	99

sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan uji statistik deskriptif diatas, dapat diketahui bahwa data penelitian ini sebanyak 100 responden. Berikut ini keterangan dari hasil analisis statistik deskriptif yang telah diolah sebagai berikut :

- a. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel kepatuhan wajib pajak adalah 24,34 dan 3,29. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

- b. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan adalah 24,41 dan 3,90. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan dalam penelitian ini baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
- c. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah 23,54 dan 3,36. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dalam penelitian ini baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
- d. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel kesadaran membayar pajak adalah 20,60 dan 3,02. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel kesadaran membayar pajak dalam penelitian ini baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
- e. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan adalah 15,12 dan 3,26. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dalam

penelitian ini baik, karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

4. Hasil Uji Validitas

Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu diuji validitasnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan berupa item pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat mengukur secara cermat, cepat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

a. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pernyataan. Nilai R hitung dibandingkan dengan nilai R tabel, apabila $R_{hitung} > R_{tabel}$; maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid, jumlah uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 100 responden, dengan jumlah sampel 98 ($df=N-2$) dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat diketahui $R_{tabel} = 0,1966$ (Ghozali, 2016:52-55).

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pernyataan kuesioner dari variabel persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran

membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,76164	0,1946	Valid
2	0,682065	0,1946	Valid
3	0,793033	0,1946	Valid
4	0,578949	0,1946	Valid
5	0,514005	0,1946	Valid
6	0,574537	0,1946	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 diperoleh seluruh nilai (r_{hitung}) lebih besar daripada r tabel pada jumlah sampel N sebanyak 100, karena ini dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga semua pertanyaan dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.5
Validitas Variabel Persepsi yang Baik atas Efektifitas Perpajakan

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,659608	0,1946	Valid
2	0,627168	0,1946	Valid
3	0,316378	0,1946	Valid
4	0,478115	0,1946	Valid
5	0,757337	0,1946	Valid
6	0,625432	0,1946	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pertanyaan 1 sampai 6 diperoleh seluruh nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel

pada jumlah sampel N sebanyak 100, karena ini dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga semua pertanyaan dari variabel persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.6
Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,855358	0,1946	Valid
2	0,577005	0,1946	Valid
3	0,790788	0,1946	Valid
4	0,914999	0,1946	Valid
5	0,912644	0,1946	Valid
6	0,842948	0,1946	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pertanyaan 1 sampai 6 diperoleh seluruh nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel pada jumlah sampel N sebanyak 100, karena ini dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga semua pertanyaan dari variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.7
Validitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,8132	0,1946	Valid
2	0,841879	0,1946	Valid
3	0,771947	0,1946	Valid
4	0,740797	0,1946	Valid
5	0,674053	0,1946	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pertanyaan 1 sampai 6 diperoleh seluruh nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel pada jumlah sampel N sebanyak 100, karena iti dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga semua pertanyaan dari variabel kesadaran membayar pajak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4.8
Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,942208	0,1946	Valid
2	0,955891	0,1946	Valid
3	0,90881	0,1946	Valid
4	0,92738	0,1946	Valid
5	0,209013	0,1946	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pertanyaan 1 sampai 6 diperoleh seluruh nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel pada jumlah sampel N sebanyak 100, karena iti dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga semua pertanyaan dari variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk dikatakan data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai menguji apakah persamaan model regresi antar

variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak, melalui *kolmogorov smirnov* dapat diperoleh dasar pengambilan keputusan jika nilai sig $>0,05$ maka data berdistribusi normal dan sig $<0,05$ maka tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016: 154-156). Berikut hasil dari uji normalitas :

Tabel 4.9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,63948351
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,054
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,184 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus *kolmogorov smirnov test* sebagai mana tertera pada tabel 4.11 , maka dapat diperoleh nilai *Asymp sig. (2-tailed)* sebesar 0,184 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikolinieritas juga dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dengan demikian tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai yaitu menunjukkan adanya multikolinieritas nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,246	2,286		4,045	,000		
	persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan	,164	,082	,195	2,006	,048	,711	1,406
	pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	,064	,094	,065	,679	,499	,723	1,384
	kesadaran membayar pajak	,288	,122	,262	2,356	,021	,541	1,848
	tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	,244	,102	,240	2,385	,019	,662	1,511

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah Data SPSS 22

Berdasarkan hasil output uji multikolinieritas pada model regresi seperti tertera pada tabel 4.12, diperoleh data bahwa nilai *tolerance* persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,164,

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,064, kesadaran membayar pajak sebesar 0,288, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan sebesar 0,244. Semua nilai *tolerance* tersebut masing-masing $>0,1$. Sementara nilai dari VIF persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan sebesar 1,406, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 1,384, kesadaran membayar pajak sebesar 1,848, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan sebesar 1,511. Semua nilai VIF tersebut masing-masing $<10,00$. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

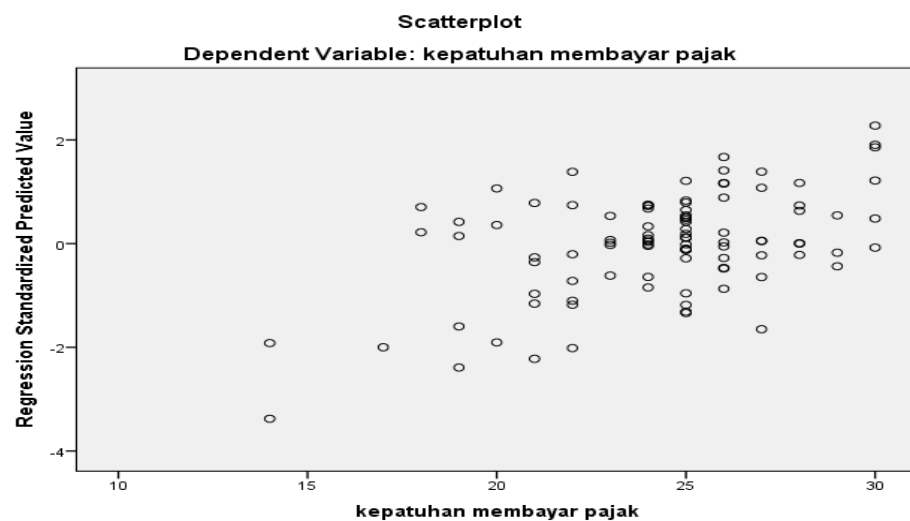
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan $\text{var}(\text{Ince})$ dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi syarat heteroskedastisitas dan dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji menggunakan grafik *scatterplot* dan analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar

kemudian menyempit), maka keadaan demikian mengidentifikasi adanya gejala heteroskedastisitas.

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka keadaan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Olah Data SPSS versi 22

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Qudratulloh, 2013:19). Pada perhitungan SPSS versi 22 menghasilkan data sebagai berikut :

Tabel 4.11
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,992	3,195		2,501	,014
persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan	,304	,080	,360	3,790	,000
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	,220	,094	,224	2,341	,021
kesadaran membayar pajak	,124	,116	,114	1,068	,288
tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	,079	,109	,078	,723	,472

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Pada kolom *unstandardized coefficient* (kolom B), tertera nilai *constant* sebesar 7,992, koefisien persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan sebesar 0,304, koefisien pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,220, koefisien kesadaran membayar pajak sebesar 0,124, koefisien tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan sebesar 0,079, dengan demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7,992 + 0,304X_1 + 0,220X_2 + 0,124X_3 + 0,079X_4$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Konstantas sebesar 7,992, artinya jika ada variabel persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan maka kepatuhan membayar pajak di KPP Pratama Tegal sebesar 7,992 satuan.

- b. Koefisien regresi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,304, artinya jika variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,304 satuan.
- c. Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,220, artinya jika variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,220 satuan.
- d. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,124, artinya jika variabel kesadaran membayar pajak ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,124 satuan.
- e. Koefisien regresi untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan sebesar 0,079, artinya jika variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,079 satuan.

7. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan pengujian signifikan level 0,005 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

Tabel 4.12
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,992	3,195		2,501	,014
persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan	,304	,080	,360	3,790	,000
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	,220	,094	,224	2,341	,021
kesadaran membayar pajak	,124	,116	,114	1,068	,288
tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	,079	,109	,078	,723	,472

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.14 diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh signifikan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikan $0,014 > 0,05$ maka hipotesis ditolak.
2. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$ maka hipotesis diterima.
3. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh signifikan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikan $0,021 > 0,05$ maka hipotesis ditolak.
4. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikan $0,288 > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dalam model terdapat pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat secara bersama-sama. Untuk dapat

mengetahui variabel independen mempengaruhi secara bersama-sama variabel dependen maka digunakan tingkat tingkat signifikan sebesar 0,05. Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275,405	4	68,851	8,204	,000 ^b
	Residual	788,918	94	8,393		
	Total	1064,323	98			

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

b. Predictors: (Constant), tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak

lah Data SPSS Versi 22

Hasil pengujian hipotesis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan embayar pajak pada tabel 4.15 yang mana tertera nilai signifikan sebesar 0,000

atau $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena nilai signifikan 0,000. Sehingga persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada hakekatnya mengukur seberapa besar kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). koefisien determinasi dapat dihitung mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika proses mendapatkan nilai R^2 yang tertinggi adalah baik, tetapi jika nilai R^2 rendah bukan berarti model regresi jelek (Ghozali, 2016 : 95). Adapun tabel hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.14

Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,509 ^a	,259	,227	2,897	,259	8,204	4	94	,000	1,624

a. Predictors: (Constant), tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.16 didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,227 atau 22,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan sebesar 22,7%. Sedangkan sisanya 71,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain pemanfaatan teknologi, sistem administrasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh suatu hasil sebagai berikut :

1. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik atas efektifitas sitem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kepatuhan dalam membayar pajak (Fahluzy, Septian, Agustina, & Linda, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal, 2014).

Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,014 lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fahluzy, Septian, Agustina, & Linda, 2014) bahwa ada pengaruh yang signifikan pada persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten kendal.

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh Surat Pemberitahuan (SPT) agar tidak dikenakan sanksi-sanksi atas kecurangan atau keterlambatan dalam penyampaian SPT, pengetahuan perpajakan dapat dioptimalkan dengan cara mengikuti sosialisasi atau melalui pendidikan karakter (Aditya dkk, 2016).

Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima dan mengandung arti bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Hal tersebut akan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajak dan agar supaya dapat terhindar dari sanksi pajak.

3. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayarkan pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak

yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat (supriadi & setiawan, 2014)

Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai signifikan 0,021 lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yulianawati, 2011) kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak.

Hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

4. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (permadi, dkk. 2013). Berbagai pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Apabila masyarakat sudah tidak percaya

terhadap sistem hukum dan pemerintahan maka kesadaran dalam memberi pajak juga akan rendah.

Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan memiliki nilai signifikan 0,288 lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Permadi, Tedi, & dkk, 2013) yang menyatakan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penelitian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berarti seberapa jauh masyarakat mempercayai kinerja dan sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada di negara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dilapangan banyak ditemui bahwa sistem perpajakan ini sudah dimanfaatkan oleh beberapa responden tetapi pemanfaatan sistem perpajakan masih agak menyulitkan untuk beberapa responden yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib

Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan dan memiliki kepatuhan untuk membayar pajak.

4. Kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan membayar pajak.
5. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa saran yang mungkin berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di penelitian yang akan datang yaitu :

1. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Agar lebih signifikan disarankan kepada responden untuk meningkatkan sikap berpikir bahwa pajak merupakan hal terpenting negara untuk pendidikan, pembangunan, dan kesehatan yang nantinya akan berguna bagi kemajuan masyarakat.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Agar signifikan disarankan memberikan

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang mudah diakses oleh masyarakat dimanapun.

3. Kesadaran membayar pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Agar lebih signifikan perlu ditingkatkannya pelayanan disetiap KPP agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Agar lebih signifikan pemerintah harus mensosialisasikan peraturan, ketentuan dan kebijakan tentang perpajakan kepada masyarakat.
5. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal diharapkan dapat melaksanakan dan dapat menegakkan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku supaya wajib pajak agar patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan.
6. Penelitian berikutnya hendaknya dapat digunakan sebagai acuan apabila melakukan penelitian tentang kepatuhan membayar pajak bagi penelitian yang akan datang. Dengan menambahkan variabel bebas dan dapat diharapkan meningkatkan model penelitian yang lebih baik dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Permatasari, & Viega. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6 No.2, 745-759.
- Chomsatun, & Kustiyah. (2015). Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.
- Fahluzy, Septian, F., Agustina, & Linda. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. Diambil kembali dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Fikriningrum, Winda Kurnia, & Muchamad Syafruddin. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting*, Vol. 1 No.2, 1-15.
- Handayani SW, Fathurohman A, & Pratiwi U. (2012). Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Kemauan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi. Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman*.
- Handayani, & dkk. (2012). Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan*, 3 No.2, 126-142.
- Hardiningsih, Pancawati, & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 No.1, 126-142.
- Hasanah, Niswatun, & dkk. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analisis Journal*. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Indonesia, U.-U. R. (2007). *Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan No.28*.
- K Sarunan, & Widiya. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Journal Emba*, Vol.3 No.4, 518-526.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Samksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Accounting*, Vo.2 No.4. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Murti, Hangga Wicaksono, & dkk. (2014). Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Journal Emba*, Vol.2 No.3, 389-398.

- Nugroho, & Agus. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Pandiangan, & Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Perpajakan, D. J. (2013). *Berita Pajak*.
- Pratiwi, Agung Mas Andriani, Setiawan, & Putu Ery. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan Negara, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota dan Pasar. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.6 No.1*, 139-153.
- Rahmawati, Juli, & Retno. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Said, M. (2013). *Fenomena Pajak, Berita Pajak*.
- Santoso. (2015). *Uji Multikolonieritas*.
- Sekaran, & Uma. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trenggunawati. (2009). *Sampel*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir III). *Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factor That Influence Willingness to Pay the Tax). *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3 No.1*, 126-142.
- Yusro, Heni Wachidatul, & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.ac.id/sju/index/php/aaj>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuisisioner Penelitian

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dikantor
Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)**

Yth. Bapak/Ibu

Di KPP Pratama Tegal

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi jenjang strata (S1) dan sesuai dengan judul diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi kuisisioner ini sesuai dengan keadaan yang dialami dan dirasakan. Saya menjamin penuh kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu berikan.

Atas kerjasamanya dan kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan banyak terimakasih. Semoga bantuan yang Bapak/Ibu berikan dapat mendukung penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Peneliti

Suci Roimawati

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama (boleh tidak diisi) :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Gelar Akademis Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1

☐ S2 ☐ S3

Jabatan :

Lama Bapak/Ibu menempati jabatan ini : Tahun

NPWP : (diisi petugas)

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberi tanda (√) pada kolom yang mewakili pilihan jawaban Bapak/Ibu dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. KS : Kurang Setuju
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Lampiran 3

C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

TS : Tidak Setuju : Skor 2

KS : Kurang Setuju : Skor 3

S : Setuju : Skor 4

SS : Sangat Setuju : Skor 5

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	1. Kontribusi	5	4	3	2	1
1.	Apakah wajib pajak sudah mengupdate peraturan perpajakan terbaru secara <i>onlin</i> melalui internet agar memudahkan dalam mendapatkan informasi.					
2.	Apakah wajib pajak sudah konsultasi pada kantor pajak apa saja yang harus dibayarkan.					
2. Peraturan						
3.	Apakah wajib pajak sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir.					
4.	Apakah wajib pajak selalu melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang terutang.					
3. Pengeluaran						
5.	Apakah wajib pajak sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.					
6.	Apakah wajib pajak sudah mendapatkan berapa besar jumlah pajak yang di tanggungkan melalui laporan keuangan.					

2. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

TS : Tidak Setuju : Skor 2

KS : Kurang Setuju : Skor 3

S : Setuju : Skor 4

SS : Sangat Setuju : Skor 5

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	1. Interpretasi	5	4	3	2	1
1.	Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) melalui <i>e</i> -SPT dan <i>e-filling</i> lebih mudah dan cepat.					
2.	Apakah menurut wajib pajak pembayaran melalui <i>e-banking</i> mempermudah dalam pembayaran pajak.					
3.	Apakah wajib pajak sudah mengetahui batas waktu penyampaian SPT.					
2. Pengukuran						
4.	Apakah menurut wajib pajak dengan <i>e-regISTRATION</i> akan memudahkan dalam memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
5.	Apakah menurut wajib pajak pelaporan SPT melalui pengisian menggunakan <i>e</i> -SPT dan <i>e-Felling</i> lebih mudah dan cepat.					
6.	Apakah wajib pajak sudah mengupdate peraturan perpajakan terbaru secara online melalui internet untuk dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi.					

3. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

TS : Tidak Setuju : Skor 2

KS : Kurang Setuju : Skor 3

S : Setuju : Skor 4

SS : Sangat Setuju : Skor 5

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	1. Pemahaman	5	4	3	2	1
1.	Apakah menurut wajib pajak dengan <i>e-regISTRATION</i> akan memudahkan saya memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
2.	Apakah wajib pajak mengetahui jika membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan.					
3.	Apakah wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung.					
2. Penalaran						
4.	Apakah wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana bagi masyarakat.					
5.	Apakah wajib pajak mengetahui berapa tarif pajak yang harus dibayarkan.					
3. Peraturan						
6.	Apakah wajib pajak telah mengetahui dalam undang-undang perpajakan yang terlambat akan tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda).					

4. Kesadaran Membayar Pajak

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

TS : Tidak Setuju : Skor 2

KS : Kurang Setuju : Skor 3

S : Setuju : Skor 4

SS : Sangat Setuju : Skor 5

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	1. Pengetahuan	5	4	3	2	1
1.	Apakah wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negarayang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.					
2. Keyakinan						
2.	Apakah wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
3.	Apakah wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.					
3. Penalaran						
4.	Apakah wajib pajak mengetahui bahwa kontribusi merupakan dana wajib untuk pengeluaran umum dan tugas pemerintah.					
5.	Apakah wajib pajak mengetahui tentang penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.					

5. Tingkat kepercayaan Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

TS : Tidak Setuju : Skor 2

KS : Kurang Setuju : Skor 3

S : Setuju : Skor 4

SS : Sangat Setuju : Skor 5

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	1. Penilaian	5	4	3	2	1
1.	Apakah wajib pajak mengetahui tentang sistem yang dijalankan pemerintah sudah berjalan dengan baik.					
2.	Apakah wajib pajak mengetahui hukum yang dijalankan pemerintah sudah berjalan dengan baik.					
2. Kepentingan						
3.	Apakah wajib pajak percaya terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan akan kembali ke rakyat.					
4.	Apakah keinginan untuk membayar pajak karena politis dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenang dengan baik.					
5.	Apakah wajib pajak mengetahui bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.					

Lampiran 4

DATA PENELITIAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Responden	Pertanyaan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	4	5	5	5	5	29
2	4	4	4	4	4	3	23
3	4	4	4	5	5	4	26
4	5	3	5	4	5	3	25
5	3	3	4	5	5	4	24
6	5	5	5	5	5	5	30
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	4	4	4	5	4	25
9	4	4	3	4	4	3	22
10	2	2	2	2	3	3	14
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	4	5	5	3	4	26
13	5	4	5	5	5	3	27
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	4	4	3	1	22
16	4	4	4	4	5	4	25
17	5	4	4	4	4	4	25
18	3	2	3	3	4	3	18
19	4	5	4	4	4	4	25
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	4	4	4	4	4	25
24	4	4	4	4	5	3	24
25	5	4	4	4	4	4	25
26	2	2	3	2	3	2	14
27	4	4	4	5	5	4	26
28	5	5	4	3	5	3	25
29	5	5	4	5	5	3	27
30	4	4	4	4	4	4	24
31	2	2	3	5	5	2	19
32	5	4	4	4	5	4	26
33	4	4	4	5	5	3	25

34	5	4	4	5	5	4	27
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	4	4	4	5	4	25
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	5	4	2	3	4	22
39	3	2	3	4	4	3	19
40	5	4	4	5	3	4	25
41	4	4	4	5	5	4	26
42	5	5	4	5	5	1	25
43	5	5	5	4	3	5	27
44	5	4	5	4	5	3	26
45	5	4	5	4	4	4	26
46	4	4	4	3	4	4	23
47	2	2	2	4	4	3	17
48	4	4	3	4	4	3	22
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	4	4	5	28
52	3	3	4	4	5	4	23
53	5	4	5	4	4	3	25
54	4	4	4	2	3	4	21
55	4	4	4	5	5	3	25
56	5	4	5	3	5	5	27
57	5	4	5	3	5	5	27
58	4	4	4	5	5	3	25
59	4	3	4	2	3	4	20
60	5	3	5	4	4	3	24
61	3	5	4	4	5	4	25
62	5	5	5	4	4	5	28
63	5	4	5	5	5	5	29
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	2	3	4	4	3	20
66	2	4	2	4	4	3	19
67	4	4	4	3	4	4	23
68	5	4	5	4	4	4	26
69	5	5	5	4	5	3	27
70	5	5	5	4	3	5	27
71	5	4	4	5	5	1	24
72	4	4	4	5	5	4	26
73	5	2	4	5	3	4	23
74	3	5	3	4	4	3	22

75	4	4	4	2	3	4	21
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	5	4	4	5	4	26
78	5	4	5	5	5	5	29
79	5	5	4	5	5	4	28
80	4	4	4	5	5	3	25
81	5	2	4	4	5	4	24
82	2	4	3	5	5	2	21
83	4	2	4	4	4	4	22
84	5	3	3	5	5	3	24
85	5	4	4	5	5	3	26
86	4	2	4	4	4	4	22
87	2	4	3	5	5	2	21
88	5	4	4	4	5	4	26
89	4	4	4	5	5	3	25
90	5	5	4	5	5	4	28
91	5	4	5	5	5	5	29
92	4	4	4	4	5	4	25
93	4	5	4	4	4	4	25
94	4	2	4	2	3	4	19
95	3	4	3	4	4	3	21
96	5	4	4	5	3	4	25
97	4	5	4	5	5	4	27
98	5	5	4	5	5	4	28
99	5	4	5	4	4	3	25
100	5	4	5	4	4	4	26

Lampiran 5

DATA PENELITIAN

PERSERPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

Responden	Pertanyaan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	5	4	3	4	4	24
3	4	5	5	4	5	5	28
4	4	5	3	5	4	4	25
5	5	5	4	4	4	3	25
6	5	5	5	5	5	5	30
7	4	5	5	5	4	4	27
8	5	5	4	4	4	4	26
9	4	3	4	3	2	3	19
10	2	3	2	3	2	2	14
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	4	4	4	5	5	27
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	3	1	3	5	3	20
16	4	4	4	5	5	5	27
17	4	4	4	5	5	4	26
18	5	5	4	5	5	1	25
19	5	5	3	4	4	5	26
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	4	4	4	4	5	25
24	4	4	4	4	4	5	25
25	4	4	4	4	4	5	25
26	4	4	4	2	4	3	21
27	5	4	4	5	5	4	27
28	5	5	3	5	5	4	27
29	5	5	3	5	5	4	27
30	5	4	4	5	5	4	27
31	4	4	4	2	4	3	21
32	4	4	4	4	4	5	25
33	4	4	4	4	4	5	25

34	4	4	4	4	4	5	25
35	5	5	4	5	5	5	29
36	4	4	5	4	4	4	25
37	4	4	3	4	4	4	23
38	5	5	3	4	4	5	26
39	5	5	4	5	5	1	25
40	4	4	5	5	5	4	27
41	4	4	4	5	5	5	27
42	5	3	5	3	5	3	24
43	5	5	3	5	5	5	28
44	5	4	4	4	5	5	27
45	5	5	4	5	5	5	29
46	4	4	5	4	4	4	25
47	2	3	5	3	2	2	17
48	4	3	4	5	2	3	21
49	5	5	4	3	4	4	25
50	4	5	5	4	4	4	26
51	5	5	4	5	5	5	29
52	5	5	4	4	4	3	25
53	4	5	4	5	4	4	26
54	4	5	4	5	5	5	28
55	4	5	4	4	4	4	25
56	5	5	5	3	5	5	28
57	5	5	5	3	5	5	28
58	4	5	4	4	4	4	25
59	4	5	4	5	5	5	28
60	4	5	4	4	4	4	25
61	5	5	5	5	4	3	27
62	5	5	4	3	5	5	27
63	4	5	5	5	4	4	27
64	5	5	4	5	4	4	27
65	4	3	4	5	2	3	21
66	2	3	5	4	2	2	18
67	4	4	5	4	4	4	25
68	5	5	4	4	5	5	28
69	5	4	4	5	5	5	28
70	5	5	3	4	5	5	27
71	5	3	5	4	5	3	25
72	4	4	4	4	5	5	26
73	4	4	5	2	5	4	24
74	5	5	4	5	5	1	25

75	5	5	3	5	4	5	27
76	4	4	3	5	4	4	24
77	4	4	5	5	4	4	26
78	5	5	5	2	5	5	27
79	4	4	5	4	4	5	26
80	4	4	5	4	4	5	26
81	4	4	5	4	4	5	26
82	4	4	5	5	4	3	25
83	5	4	5	4	5	4	27
84	5	5	5	4	5	4	28
85	5	5	5	4	5	4	28
86	5	4	5	5	5	4	28
87	4	4	5	5	4	3	25
88	4	4	5	5	4	5	27
89	4	4	5	3	4	5	25
90	4	4	5	5	4	5	27
91	5	5	5	4	5	5	29
92	4	4	5	5	4	4	26
93	4	4	3	4	4	4	23
94	5	5	3	3	4	5	25
95	5	5	4	3	5	1	23
96	4	4	5	4	5	4	26
97	4	4	4	5	5	5	27
98	5	3	5	5	5	3	26
99	5	5	3	4	5	5	27
100	5	4	4	5	5	5	28

Lampiran 6

DATA PENELITIAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN

Responden	Pertanyaan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	3	4	3	4	2	20
3	5	5	3	5	5	5	28
4	4	4	4	4	3	4	23
5	4	5	5	5	5	5	29
6	5	5	5	5	5	5	30
7	4	5	4	5	4	3	25
8	4	5	4	5	4	4	26
9	4	3	4	4	4	3	22
10	3	3	2	2	2	2	14
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	3	4	5	5	3	25
14	5	5	5	5	5	5	30
15	3	4	2	3	2	3	17
16	4	4	4	5	4	4	25
17	5	4	4	5	5	4	27
18	4	5	4	4	4	4	25
19	4	3	4	4	4	4	23
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	3	4	4	4	23
25	4	4	3	4	3	4	22
26	2	4	2	2	2	2	14
27	4	4	4	5	4	4	25
28	3	4	5	4	4	5	25
29	3	5	5	4	4	5	26
30	4	4	4	5	4	4	25
31	2	4	2	2	2	2	14
32	4	4	3	4	3	4	22

33	4	4	3	4	4	4	23
34	4	4	4	4	4	4	24
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	3	4	4	4	4	23
39	4	5	4	4	4	4	25
40	5	4	4	5	5	4	27
41	4	4	4	5	4	4	25
42	3	4	2	3	2	3	17
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	3	4	5	5	3	25
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	4	4	4	4	4	24
47	3	3	2	2	2	2	14
48	4	3	4	4	4	3	22
49	4	5	4	5	4	4	26
50	4	5	4	5	4	3	25
51	5	5	5	5	5	5	30
52	4	5	5	5	5	5	29
53	4	4	4	4	3	4	23
54	5	5	3	5	5	5	28
55	4	3	4	3	4	2	20
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	5	30
58	4	3	4	3	4	2	20
59	5	5	3	5	5	5	28
60	4	4	4	4	3	4	23
61	4	5	5	5	5	5	29
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	5	4	5	4	3	25
64	4	5	4	5	4	4	26
65	4	3	4	4	4	3	22
66	3	3	2	2	2	2	14
67	4	4	4	4	4	4	24
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	3	4	5	5	3	25
70	5	5	5	5	5	5	30
71	3	4	2	3	2	3	17
72	4	4	4	5	4	4	25
73	5	4	4	5	5	4	27

74	4	5	4	4	4	4	25
75	4	3	4	4	4	4	23
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	5	5	5	5	5	30
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	3	4	4	4	23
81	4	4	3	4	3	4	22
82	2	4	2	2	2	2	14
83	4	4	4	5	4	4	25
84	3	1	5	4	4	5	22
85	3	1	5	4	4	5	22
86	4	4	4	5	4	4	25
87	2	4	2	2	2	2	14
88	4	4	3	4	3	4	22
89	4	4	3	4	4	4	23
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	3	4	4	4	4	23
95	4	5	4	4	4	4	25
96	5	4	4	5	5	4	27
97	4	4	2	5	4	4	23
98	3	4	5	3	2	3	20
99	5	5	4	5	5	5	29
100	5	3	5	5	5	3	26

Lampiran 7

DATA PENELITIAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

Responden	Pertanyaan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	25
2	3	4	4	4	4	19
3	5	5	3	4	4	21
4	4	4	5	5	4	22
5	5	5	5	5	5	25
6	5	5	5	5	5	25
7	4	5	5	3	4	21
8	4	5	5	4	4	22
9	4	4	5	3	4	20
10	2	3	2	3	2	12
11	4	4	4	4	4	20
12	5	5	5	5	5	25
13	3	5	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	2	3	3	3	2	13
16	5	4	5	4	4	22
17	5	5	4	4	5	23
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	3	4	19
21	4	4	4	4	4	20
22	4	5	5	5	5	24
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	2	4	4	4	4	18
27	4	4	5	4	3	20
28	5	4	5	5	1	20
29	5	4	5	5	1	20
30	4	4	5	4	3	20
31	2	4	4	4	4	18
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20

34	4	4	4	4	4	20
35	4	5	5	5	5	24
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	3	4	19
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	5	5	4	4	5	23
41	5	4	5	4	4	22
42	2	3	3	3	2	13
43	5	5	5	5	5	25
44	3	5	4	4	4	20
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	20
47	2	3	2	3	2	12
48	4	4	5	3	4	20
49	4	5	5	4	4	22
50	4	5	5	3	4	21
51	5	5	5	5	5	25
52	5	5	5	5	5	25
53	4	4	5	5	4	22
54	5	5	3	4	4	21
55	3	4	4	4	4	19
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	3	4	4	4	4	19
59	5	5	3	4	4	21
60	4	4	5	5	4	22
61	5	5	5	5	5	25
62	5	5	5	5	5	25
63	4	5	5	3	4	21
64	4	5	5	4	4	22
65	4	4	5	3	4	20
66	2	3	2	3	2	12
67	4	4	4	4	4	20
68	5	5	5	5	5	25
69	3	5	4	4	4	20
70	5	5	5	5	5	25
71	2	3	3	3	2	13
72	5	4	5	4	4	22
73	5	5	4	4	5	23
74	4	4	4	4	4	20

75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	3	4	19
77	4	4	4	4	4	20
78	4	5	5	5	5	24
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	2	4	4	4	4	18
83	4	4	5	4	3	20
84	5	4	5	5	1	20
85	5	4	5	5	1	20
86	4	4	5	4	3	20
87	2	4	4	4	4	18
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	5	5	5	5	24
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	3	4	19
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	5	5	4	4	5	23
97	5	4	5	4	4	22
98	2	3	3	3	5	16
99	5	5	5	5	2	22
100	3	5	4	4	4	20

Lampiran 8

DATA PENELITIAN PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Responden	Pertanyaan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	20
2	4	4	4	4	3	16
3	4	4	4	4	5	16
4	3	3	3	2	4	11
5	4	4	5	4	5	17
6	5	5	5	5	5	20
7	3	3	3	3	4	12
8	4	3	3	3	4	13
9	3	2	3	3	4	11
10	3	3	2	3	2	11
11	3	3	3	3	4	12
12	4	4	5	4	5	17
13	5	4	4	4	4	17
14	5	5	5	5	5	20
15	1	1	3	2	4	7
16	2	2	2	2	4	8
17	5	5	5	5	5	20
18	2	2	3	2	4	9
19	4	4	4	4	4	16
20	5	4	5	3	4	17
21	4	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	5	20
23	4	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	4	16
25	4	3	4	4	4	15
26	1	1	1	1	2	4
27	3	4	4	4	4	15
28	4	4	5	5	1	18
29	4	4	5	5	3	18

30	3	4	4	4	4	15
31	3	4	5	2	4	14
32	4	3	4	4	4	15
33	4	4	4	4	5	16
34	4	4	4	4	3	16
35	5	5	5	5	4	20
36	4	4	4	4	5	16
37	5	4	5	3	5	17
38	4	4	4	4	5	16
39	2	2	3	2	4	9
40	5	5	5	5	3	20
41	2	2	2	2	4	8
42	1	1	3	2	4	7
43	5	5	5	5	5	20
44	5	4	4	4	4	17
45	4	4	5	4	3	17
46	3	3	3	3	3	12
47	3	3	2	3	4	11
48	3	2	3	3	5	11
49	4	3	3	3	4	13
50	3	3	3	3	4	12
51	5	5	5	5	4	20
52	4	4	5	4	5	17
53	3	3	3	2	5	11
54	4	4	4	4	5	16
55	4	4	4	4	4	16
56	5	5	5	5	2	20
57	5	5	5	5	2	20
58	4	4	4	4	3	16
59	4	4	4	4	3	16
60	3	3	3	2	4	11
61	4	4	5	4	4	17
62	5	5	5	5	5	20
63	3	3	3	3	4	12
64	4	3	3	3	4	13
65	3	2	3	3	4	11
66	3	3	2	3	4	11
67	3	3	3	3	3	12
68	4	4	5	4	5	17
69	5	4	4	4	5	17

70	5	5	5	5	5	20
71	1	1	3	2	4	7
72	2	2	2	2	3	8
73	5	5	5	5	3	20
74	2	2	3	2	4	9
75	4	4	4	4	3	16
76	5	4	5	3	3	17
77	4	4	4	4	5	16
78	5	5	5	5	4	20
79	4	4	4	4	4	16
80	4	4	4	4	5	16
81	4	3	4	4	4	15
82	4	5	4	3	3	16
83	3	4	4	4	4	15
84	4	4	5	5	5	18
85	4	4	5	5	4	18
86	3	4	4	4	5	15
87	4	5	4	3	5	16
88	4	3	4	4	4	15
89	4	4	4	4	4	16
90	4	4	4	4	5	16
91	5	5	5	5	4	20
92	4	4	4	4	4	16
93	5	4	5	3	3	17
94	4	4	4	4	4	16
95	2	2	3	2	4	9
96	5	5	5	5	5	20
97	2	2	2	2	2	8
98	1	1	3	2	4	7
99	5	5	5	5	5	20
100	5	4	4	4	4	17

Lampiran 9

Uji Validitas

Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	keterangan
1	0,76164	0,1946	Valid
2	0,682065	0,1946	Valid
3	0,793033	0,1946	Valid
4	0,578949	0,1946	Valid
5	0,514005	0,1946	Valid
6	0,574537	0,1946	Valid

Lampiran 10

Validitas Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,659608	0,1946	Valid
2	0,627168	0,1946	Valid
3	0,316378	0,1946	Valid
4	0,478115	0,1946	Valid
5	0,757337	0,1946	Valid
6	0,625432	0,1946	Valid

Lampiran 11

Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,855358	0,1946	Valid
2	0,577005	0,1946	Valid
3	0,790788	0,1946	Valid
4	0,914999	0,1946	Valid
5	0,912644	0,1946	Valid
6	0,842948	0,1946	Valid

Lampiran 12

Validitas Kesadaran Membayar Pajak

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,8132	0,1946	Valid
2	0,841879	0,1946	Valid
3	0,771947	0,1946	Valid
4	0,740797	0,1946	Valid
5	0,674053	0,1946	Valid

Lampiran 13

Validitas Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,942208	0,1946	Valid
2	0,955891	0,1946	Valid
3	0,90881	0,1946	Valid
4	0,92738	0,1946	Valid
5	0,209013	0,1946	Valid

Lampiran 14

Descriptive Statistic

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan membayar pajak	24,34	3,296	99
persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan	24,41	3,902	99
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	23,54	3,360	99
kesadaran membayar pajak	20,60	3,027	99
tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	15,12	3,262	99

Lampiran 15

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,63948351
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,054
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,184 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 16

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,992	3,195		2,501	,014
persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan	,304	,080	,360	3,790	,000
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	,220	,094	,224	2,341	,021
kesadaran membayar pajak	,124	,116	,114	1,068	,288
tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	,079	,109	,078	,723	,472

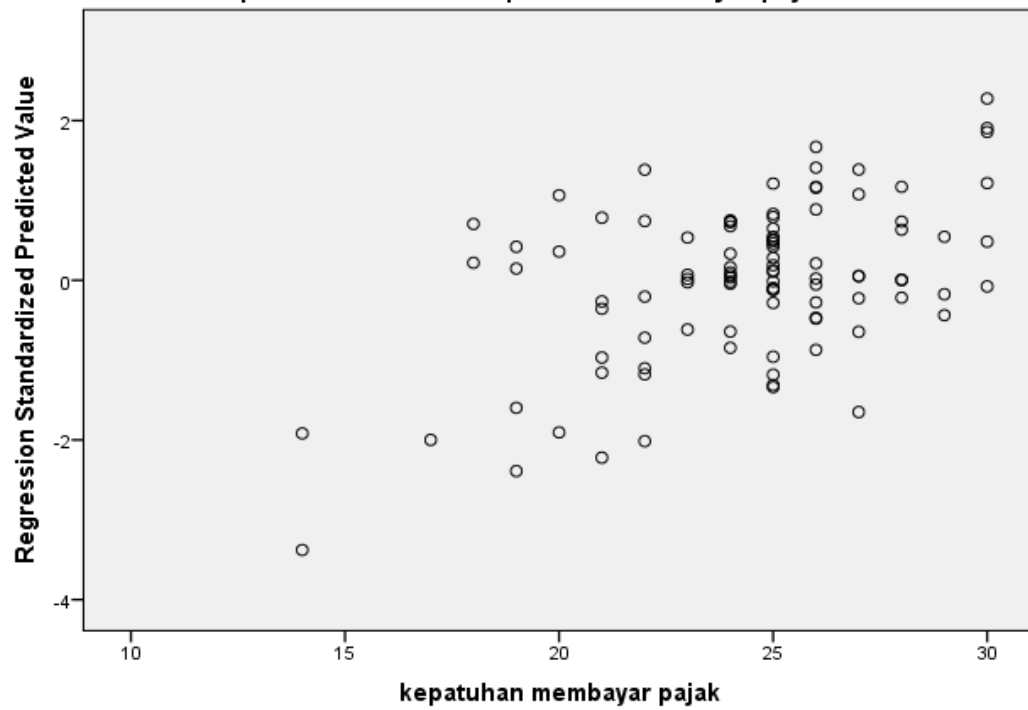
a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Lampiran 17

scatterplot

Scatterplot

Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak



Lampiran 18

Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,992	3,195		2,501	,014
persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan	,304	,080	,360	3,790	,000
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	,220	,094	,224	2,341	,021
kesadaran membayar pajak	,124	,116	,114	1,068	,288
tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	,079	,109	,078	,723	,472

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Lampiran 19

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,992	3,195		2,501	,014
persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan	,304	,080	,360	3,790	,000
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	,220	,094	,224	2,341	,021
kesadaran membayar pajak tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	,124	,116	,114	1,068	,288
	,079	,109	,078	,723	,472

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Lampiran 20

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275,405	4	68,851	8,204	,000 ^b
	Residual	788,918	94	8,393		
	Total	1064,323	98			

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

b. Predictors: (Constant), tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak

Lampiran 21

Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	
1	,509 ^a	,259	,227	2,897	,259	8,204	4	94	,000	1,624

a. Predictors: (Constant), tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

JALAN KOL. SUGIONO NO. 5 TEGAL 52113
TELEPON : 0283 - 353003, 356006; FAKSIMILE: 0283 - 356897; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-3968/WPJ.10/KP.01/2019
Sifat : Biasa
Hal : Jawaban atas Ijin Observasi

25 Maret 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pancasakti
Jl. Halmahera km.1
Tegal

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 140/K/E/FEB/UPS/III/2019 tanggal 14 Januari 2019 Hal Permohonan Izin Observasi, atas :

Nama/NPM : Suci Roimawati/4314500190

Prodi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

dengan ini KPP Pratama Tegal memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Tegal, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang dapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *soft-copy* dan satu *hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *e-mail* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id. *Hard-copy* dimaksud dikirim ke alamat KPP Pratama Tegal, Jalan Kolonel Sugiono No.5, Tegal.

Demikian disampaikan dan harap maklum.



Tembusan :
Direktur P2 Humas

Kp.:KP.01/KP.0101/2019



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

JALAN KOL. SUGIONO NO. 5 TEGAL 52113
TELEPON : 0283 - 353003, 356006; FAKSIMILE: 0283 - 356897; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET-17/WPJ.10/KP.01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Gunawan
NIP : 19701031 199503 1 001
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Organisasi : KPP Pratama Tegal

menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Suci Roimawati
NPM : 4314500190
Perguruan Tinggi : Universitas Pancasakti Tegal
Alamat Domisili : Ds. Johorejo 05/02 Kec. Gemuh Kab. Kendal

telah melakukan penelitian/riset dan/atau meminta bahan-bahan keterangan/data yang dipergunakan untuk keperluan akademis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Tegal, 25 Maret 2019
Kepala Kantor
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
Budi Gunawan
NIP. 19701031 199503 1 001